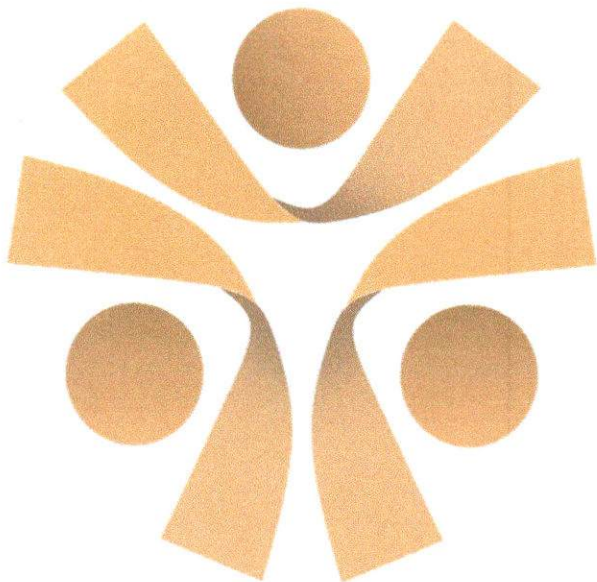


LAPORAN KEUANGAN BP3MI JAWA BARAT

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024



Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40275
Telpon/Fax : 022-7336965/7333212
E-mail : bp3mi.jabar@bp2mi.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

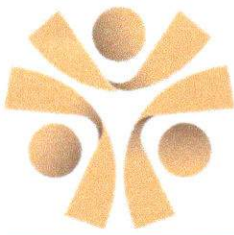
Bandung, Januari 2025
Kepala BP3MI Jawa Barat



Mulia Nugraha, S.I.K., M.H.
Komisaris Besar Polisi

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	39
VI. Lampiran dan Daftar	



**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA -
JAWA BARAT**

Jl. Soekarno Hatta No. 587, Kel. Binong, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
Telp.: 022- 7336965 www.bp2mi.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Bandung, Januari 2025
Kepala BP3MI Jawa Barat

Mulia Nugraha, S.I.K., M.H.
Kombesaris Besar Polisi

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp27.743.143 atau mencapai 0,00 persen. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat pada tidak ada estimasi terhadap Anggaran Pendapatan tersebut.

Realisasi Belanja Negara pada periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.798.639.694 atau mencapai 93,86 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.701.007.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp12.749.171.132 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp46.398.164; Aset Tetap (netto) sebesar Rp12.676.146.222.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp42.199.866 dan Rp12.706.971.266.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.717.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp13.325.242.180 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.315.525.180. Defisit Kegiatan Non

Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp18.026.143 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.297.499.037.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp11.603.575.325 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp13.297.499.037 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp970.856 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp14.399.924.122 dengan penurunan Ekuitas sebesar Rp1.103.395.941 sehingga Ekuitas Entitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.706.971.266.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR BP3MI JAWA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT.	TAHUN 2024				TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (DI BAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	0	27.743.143	27.743.143	0,00	32.691.175
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		0	27.743.143	27.743.143	0,00	32.691.175
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	3.300.660.000	3.290.645.379	(10.014.621)	99,70	4.733.948.141
Belanja Barang	B.3	10.760.711.000	9.878.778.204	(881.932.796)	91,80	9.269.979.790
Belanja Modal	B.4	639.636.000	629.216.111	(10.419.889)	98,37	93.050.000
JUMLAH BELANJA		14.701.007.000	13.798.639.694	(902.367.306)	93,86	14.096.977.931

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR BP3MI JAWA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	46.398.164	33.973.494
JUMLAH ASET LANCAR		46.398.164	33.973.494
ASET TETAP			
Tanah	C.2	8.573.442.000	8.573.442.000
Peralatan dan Mesin	C.3	5.854.082.098	5.819.209.198
Gedung dan Bangunan	C.4	3.550.296.828	3.387.336.167
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.5	(5.301.674.704)	(6.015.097.772)
JUMLAH ASET TETAP		12.676.146.222	11.764.889.593
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.6	73.084.772	73.084.772
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	(73.084.772)	(73.084.772)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA			
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.8	26.626.746	-
Aset Lain-lain	C.9	1.106.836.550	-
AKUMULASI PENYUSUTAN /AMORTISASI ASET LAINNYA	C.10	(1.106.836.550)	-
JUMLAH ASET LAINNYA		26.626.746	-
JUMLAH ASET		12.749.171.132	11.798.863.087
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	42.199.866	195.287.762
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		42.199.866	195.287.762
JUMLAH KEWAJIBAN		42.199.866	195.287.762
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	12.706.971.266	11.603.575.325
JUMLAH EKUITAS		12.706.971.266	11.603.575.325
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.749.171.132	11.798.863.087

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR BP3MI JAWA BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DES 2024	31 DES 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	9.717.000	9.504.000
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.717.000	9.504.000
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		9.717.000	9.504.000
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	3.112.741.353	4.707.959.885
Beban Persediaan	D.3	87.850.941	94.008.606
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.612.230.303	6.160.251.329
Beban Pemeliharaan	D.5	408.397.973	348.867.841
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.758.283.701	2.466.355.936
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	345.737.909	161.143.569
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		(13.325.242.180)	(13.938.587.166)
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN		13.315.525.180	13.929.083.166
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	(18.026.143)	(23.187.175)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	-	(656.376)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		18.026.143	13.026.799
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		13.287.782.037	13.906.552.367
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		13.287.782.037	13.906.552.367

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR BP3MI JAWA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
EKUITAS AWAL	E.1	11.603.575.325	11.388.054.636
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(13.297.499.037)	(13.906.552.367)
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI EKUITAS	E.3	970.856	0
Penyesuaian Nilai Aset		0	0
Koreksi Nila Aset Tetap Non Revaluasi		970.856	0
JUMLAH		970.856	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	14.399.924.122	14.122.073.056
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	1.103.395.941	215.520.689
EKUITAS AKHIR	E.6	12.706.971.266	11.603.575.325

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BP3MI Jawa Barat

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat sebelumnya disebut Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung sebelumnya disebut Balai Antar Kerja Antar Negara (**BALAI AKAN**) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 23 Tahun 1984, Kemudian berubah menjadi Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep- 137/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Setelah adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 sesuai amanat UU No. 39 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2019 sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen dengan Visi **“Terwujudnya TKI yang Profesional, Bermartabat dan Sejahtera”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi BP2MI sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri;
2. Meningkatkan pelayanan penempatan TKI yang mudah, murah, cepat, dan aman;
3. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan TKI;
4. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BP3MI Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BP3MI Jawa Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari BP3MI Jawa Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BP3MI Jawa Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ a tau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui hendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi herdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk

penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara / DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP / TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP / TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pertama Kali

Mulai Tahun 2015 Pemerintah Mengimplementasikan Akuntansi berbasis Akrua sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per September 2017 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pada tahun 2023 adalah merupakan implementasi pertama.

(9) Capaian output strategis Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung.

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Satker Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) adalah sebagai berikut :

No.	Kode	Uraian Output	Alokasi	Realisasi	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran
1.	3894.EB A-962	Layanan Umum	476.422.000	402.275.045	84.44	1	1
2.	3894.EBB-951	Layanan Prasarana Internal	247.500.000	238.689.161	96.44	1	1
3.	3894.QA A-003	Pelayanan penempatan PMI oleh pemerintah	2,368.822000	2,157.199.710	91.07	19.000	17.412
4.	4894.QA A-004	Pelayanan Pelindungan terhadap PMI	2,279.000.000	2.140.621.288	93.93	71	93
5.	3894.QA A-005	Pemberdayaan PMI purna & keluarganya	126.487.000	785,507,023	93.51	280	280
6.	4587.EB A- 994	Layanan Perkantoran	8.489.263.000	8.075.088.811	95.12	1	1

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode yang berjalan, BP3MI Jawa Barat telah mengadakan revisi ke-8 pada tanggal 31 Desember 2024 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Pagu awal sebesar Rp18.510.031.000 setelah direvisi menjadi sebesar Rp16.701.007.000, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	5.177.392.000	3.300.660.000
Belanja Barang	12.737.040.000	10.760.711.000
Belanja Modal	595.599.000	639.636.000
Jumlah Belanja	18.510.031.000	14.701.007.000

Revisi tersebut berupa adanya Pengurangan Belanja Pegawai karena Gaji Terpusat, Penambahan Belanja Barang, Anggaran Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, pemutakhiran data revisi POK, Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA dan Revisi DJA *Automatic Adjustment*. Adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan yang merubah anggaran DIPA awal pada Tahun Anggaran 2024 BP3MI Jawa Barat.

Tabel Penambahan/Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Pegawai TA 2024

No	Uraian	Pagu Semula	Pagu Revisi	Penambahan/ Pengurangan
1	Belanja Pegawai (51)	5.117.392.000	3.300.660.000	(1.816.732.000)
2	Sewa Videotran & Billboard	0	580.000.000	580.000.000
3	Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	160.000.000	160.000.000
4	Peralatan dan Mesin	0	247.500.000	247.500.000

Realisasi
Pendapatan
Rp27.743.143

B. 1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp27.743.143 atau mencapai 0,00 persen tidak ada estimasi pendapatan yang ditetapkan pada BP3MI Jawa Barat. Pendapatan BP3MI Jawa Barat berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	27.743.143	0,00%
Pendapatan Lain-Lain	0	-	0,00%
Jumlah	0	27.743.143	0,00%

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan 15,14 persen dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya penurunan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian TGR	11.835.500	0	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	35.150	23.187.175	(99,85)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	6.155.493		
Pendapatan dari Pemindahan BMN	0	0	100,00
Pendapatan Sewa Gedung & Bangunan	9.717.000	9.504.000	2,24
Jumlah	27.743.143	32.691.175	(15,14)

Pendapatan penerimaan dengan rincian terdiri dari :

No	NTB	NTPN	Jumlah
1	561395991052	0C13448VVEMFKUCD	9.717.000
2	240222047810	2923B3CIFJUMUQ59	35.150
3	240627420635	045FC61QV41U24SV	10.174.500
4	000075020001	231463CIFJR3SUG5	3.055.493
5	240403245379	7B0E461QV3R8HA53	1.661.000
6	924542094904	003A13CIFKDRNLR7	2.100.000
7	241108851763	FD9E055DF9TSPSC2	1.000.000
Jumlah			27.743.143

Realisasi Belanja
Negara
Rp13.798.639.694

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja instansi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.798.639.694 atau 93,86 persen dari anggaran belanja sebesar Rp14.701.007.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024

URAIAN	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.300.660.000	3.290.645.379	99,70%
Belanja Barang	10.760.711.000	9.878.778.204	91,80%
Belanja Modal	639.636.000	629.216.111	98,37%
Jumlah	14.701.007.000	13.798.639.694	93,86%

Dibandingkan dengan Periode 31 Desember 2024 Realisasi Belanja periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,12 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penambahan antara lain:

1. Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna dan keluarga sebanyak 2 Paket;
2. Kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan PMI dari anggota DPR RI;
3. Perpindahan jabatan pelaksana menjadi Jabatan Fungsional sebanyak 5 pegawai;
4. Penambahan Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 19 pegawai;
5. Penambahan Pegawai sebanyak 4 orang;
6. Penambahan Pegawai PPPK sebanyak 4 orang;
7. Sarana dan prasarana Humas dan Helpdesk di Bandara;
8. Untuk kegiatan penanganan PMI Meninggal ABT BA BUN sebanyak 86 orang.
9. Ada Pemblokiran Belanja Perjalan Dinas sebesar 50%.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.290.645.379	4.733.948.141	(30,49)
Belanja Barang	9.878.778.204	9.269.979.790	6,57
Belanja Modal	629.216.111	93.050.000	576,21
Jumlah	13.798.639.694	14.096.977.931	(2,12)

Belanja Pegawai
Rp3.290.645.379

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.290.645.379 dan Rp4.733.948.141. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.238.366.580	2.788.609.378	(19,73)
Belanja Barang Non Operasional	2.262.972.369	1.404.837.498	61,08
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100.275.611	88.474.225	13,34
Belanja Jasa	2.110.481.970	2.172.834.912	(2,87)
Belanja Pemeliharaan	408.397.973	348.867.841	17,06
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.758.283.701	2.466.355.936	11,84
Jumlah Belanja	9.878.778.204	9.269.979.790	6,57

*Belanja Modal
Rp629.216.111*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp629.216.111 dan Rp93.050.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu untuk periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 46,80 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan adanya belanja sarana dan prasarana Humas dan Helpdesk di Bandara satuan kerja BP3MI Jawa Barat beberapa tahun kemudian sehingga perlu peningkatan belanja modal disebabkan adanya pembelian sarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satker serta pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	437.062.450	93.050.000	78,71
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	198.532.741	0	85,36
Jumlah Belanja	635.595.191	93.050.000	85,36

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 . Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp46.398.164 dan Rp33.973.494.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
Barang Konsumsi	46.398.164	33.973.494
Jumlah	46.398.164	33.973.494

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Stock Opname/Pemeriksaan Fisik Persediaan nomor : BA.29/BP3MI10/PL.03.02/I/2025 tanggal 02 Januari 2025. Tetapi masih terdapat barang konsumsi senilai Rp46.398.164 dalam kondisi baik yang disajikan dalam Persediaan per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Daftar Barang Persediaan

Kode	Uraian	Rupiah Per 31-10-2024
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	6.749.377
1010301002	Tulis, Tinta Stempel	1.800.402
1010301003	Penjepit Kertas	1.160.782
1010301004	Penghapus/Korektor	643.547
1010301005	Buku Tulis	1.191.441
1010301006	Ordner Dan Map	6.181.077
1010301007	Penggaris	186.800
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	817.865
1010301010	Alat Perekat	2.598.828
1010301012	Staples	844.920
1010301013	Isi Staples	243.425
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	701.800
1010302001	Kertas HVS	8.784.000
1010302002	Berbagai Kertas	569.950
1010302004	Amplop	3.260.100
1010304004	Tinta/Toner Printer	6.639.500
1010304005	USB/Flash Disk	625.000
1010304010	Mouse	1.453.000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	1.946.350
Total		46.398.164

Tanah Rp8.573.442.000

C.2. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki BP3MI Jawa Barat Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.573.442.000 dan Rp8.573.442.000, tidak ada mutasi tanah pada per 31 Desember 2024.

Tanah seluas 943,00 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 587 Rt.03 Rw.09 Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	943 m2	Jl. Soekarno Hatta No. 587 Bandung 40287	8,573,442,000
Jumlah			8,573,442,000

Peralatan dan Mesin
Rp5.854.082.098.

C.3. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5.854.082.098 dan Rp5.819.209.198. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5.819.209.198
Mutasi Tambah:	1.144.109.450
Pembelian	437.062.450
Transfer masuk	680.074.000
Reklasifikasi masuk	26.973.000
Mutasi Kurang:	1.109.236.550
Extrakomptable	
Reklasifikasi keluar	0
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	1.109.236.550
Saldo per 31 Desember 2024	5.854.082.098
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(4.721.896.436)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1.132.185.662

1. Pembelian

A. Intrakomptabel sebesar Rp389.854.500,-

Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa Aset Tetap Yang digunakan transaksi pembelian peralatan dan mesin :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Printer	5	Rp 2.800.000	Rp 14.000.000	BA.645B/BP3MI10/PL.02.03/III/2024, tanggal 01-03-2024
2	Scanner	5	Rp 4.600.000	Rp 23.000.000	BA.645A/BP3MI10/PL.02.03/2024, tanggal 2-03-2024
3	Televisi	1	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	BA.645/BP3MI10/PL.02.03/2024, tanggal 2-03-2024
4	P.C. Unit	6	Rp 16.900.000	Rp 101.400.000	B.595/BP3MI10/PL.02.03/III/2024, tanggal 25-03-2024
5	Lap Top	5	Rp 12.900.000	Rp 64.500.000	B.583/BP3MI10/PL.02.03/III/2024, tanggal 25-3-2023
6	Rak Besi	1	Rp 3.099.000	Rp 3.099.000	HO.VF.000395, tanggal 1-07-2024
7	Mesin Absesnsi	4	Rp 4.950.000	Rp 19.800.000	B.1851/BP3MI10/PL.02.03/VII/2024, tanggal 04-07-2024
8	P.C Unit (AIO)	1	Rp 16.900.000	Rp 16.900.000	B.1851/BP3MI10/PL.02.03/VII/2024, tanggal 04-07-2024
9	Mesin Absesnsi	1	Rp 4.950.000	Rp 4.950.000	B.1851/BP3MI10/PL.02.03/VII/2024, tanggal 04-07-2024
10	Sofa	1	Rp 9.798.600	Rp 9.798.600	00008
11	Kursi Besi/Metal (Urban Managerial Chair)	1	Rp 3.299.000	Rp 3.299.000	00010
12	Meja Ruang Tamu	1	Rp 1.999.000	Rp 1.999.000	00009
13	Kursi Besi/Metal (G Council Visitor Chair)	2	Rp 1.359.000	Rp 2.718.000	00010
14	Televisi (TCL)	1	Rp 9.315.000	Rp 9.315.000	00011
15	Sound System (Auberg)	1	Rp 4.700.000	Rp 4.700.000	B.2297/BP3MI10/PL.02.02/VIII/2024, tanggal 01-08-2024
16	Dispenser (Polytron)	2	Rp 2.299.000	Rp 4.598.000	00014
17	Kasur (Spring Bed)	3	Rp 1.368.000	Rp 4.104.000	00024/UP_TUP/426355/2024, tanggal 22-08-2024
18	Lemari Besi/Metal	1	Rp 3.368.100	Rp 3.368.100	00021
19	A.C. Split (Sharp)	6	Rp 5.900.000	Rp 35.400.000	0861/BAST/MABEL/2024, tanggal 27-08-2024
JUMLAH				Rp 336.948.700	

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Kuitansi/BAST
1	2	3	4	5	6
Lanjutan Total				Rp 336.948.700	
20	Sofa Ruang Pelayanan	1	Rp 19.147.500	Rp 19.147.500	01/BAST-CV.GN/VIII/2024, tanggal 13-08-2024
21	Meja Rapat (Custom)	1	Rp 7.770.000	Rp 7.770.000	BA.3149/BP3MI10/PL.02.03/X/2024, Tgl 1-10-2024
22	Sofa (Mahoney)	1	Rp 8.798.000	Rp 8.798.000	Invoice 32, Tgl 24-2024
23	Kursi (985-986)	2	Rp 1.359.000	Rp 2.718.000	H0140006398943, Tgl 18-10-2024
24	Sofa (Elly)	1	Rp 8.898.300	Rp 8.898.300	UHO.2.20241014.9, Tgl 25-10-2024
25	Printer	1	Rp 3.875.000	Rp 3.875.000	G5102410, Tgl 25-10-2024
26	Meja Tamu	1	Rp 1.699.000	Rp 1.699.000	H0140006398939, Tgl 16-10-2024
27	Meja Resepsionis	1	Rp 7.138.950	Rp 7.138.950	HO.1.20241112.1, UHO.1.20241112.2, tanggal 12-11-2024
28	Papan Gambar (Logo)	1	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	No.3725, tanggal 29-04-2024
29	Meja Kerja Kayu (Custom)	4	Rp 3.496.500	Rp 13.986.000	BA.4419/BP3MI10/PL.02.02/XII/2024, Tanggal 27-12-2024
30	Meja Kerja Kayu (Custom)	4	Rp 3.496.500	Rp 13.986.000	BA.4420/BP3MI10/PL.02.02/XII/2024, Tanggal 27-12-2024
31	Audio Mixing Portable	1	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	#24.12.00138, tanggal 24-12-2024
32	Microphone/Boom Stand	1	Rp 3.292.000	Rp 3.292.000	#24.12.00138, tanggal 24-12-2024
33	External/Portable Hardisk (SD Card)	1	Rp 1.305.000	Rp 1.305.000	No.3726, tanggal 31-12-2024
JUMLAH				Rp 437.062.450	

B. Ekstrakomptabel sebesar Rp55.600.000,-

Mutasi Tambah perlatan dan mesin berupa Aset Tetap Yang digunakan transaksi pembelian perlatan dan mesin :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Kursi Besi/Metal	7	Rp 999.000	Rp 6.993.000	HO.VF.000396, Tgl 01-07-2024
2	Dispenser (Miyako)	2	Rp 950.000	Rp 1.900.000	BA.645/BP3MI10/PL02.03/III/2024, Tgl 2-03-2024
3	Kursi Besi/Metal (Spencer)	20	Rp 899.000	Rp 17.980.000	Invoice 00023, Tgl 27-08-2024
4	Handy Talky (FC-136R)	3	Rp 750.000	Rp 2.250.000	B.3148/BP3MI10/PL02.02/X/2024, Tgl 01-10-2024
5	Exhuase Fan (Sekai)	4	Rp 650.000	Rp 2.600.000	BA.3148/BP3MI10/PL02.03/X/2024, tanggal 11-10-2024
6	Kursi Besi Metal (Spencer)	23	Rp 859.000	Rp 19.757.000	Invoice 00031, Tgl 21-10-2024
7	Dispenser (Miyako)	2	Rp 950.000	Rp 1.900.000	Invoice 00042, Tgl 31-10-2024
8	Kursi Besi/Metal	4	Rp 555.000	Rp 2.220.000	KEP.3901/BP3MI10/PL03.01/XI/2024, tanggal 29-11-2024
JUMLAH				Rp 55.600.000	

2. Transfer Masuk sebesar Rp680.074.000

Mutasi Tambah peralatan dan mesin berupa Aset Tetap Yang digunakan transaksi transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretaris Utama dan Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Asia Afirka dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Mobil Ambulance	1	Rp540.000.000	Rp 540.000.000	BA.398.2/SU.KPB/PL03.08/III/2024, tanggal 05-03-2024
2	Kursi Besi/Metal	5	Rp 2.365.000	Rp 11.825.000	BA.416/SU.KU/PL.03.08/III/2024, tanggal 08-03-2024
3	Telephone Digital	1	Rp 2.899.000	Rp 2.899.000	BA.838/SU.KU/PL.03.08/V/2024, tanggal 22-05-2024
4	Anjungan Informasi Mandiri (AIM)	3	Rp 29.800.000	Rp 89.400.000	BA.1336/SU.PLI/PL.03.08/VI/2024, tanggal 28-06-2024
5	P.C Unit (Dell 3650 Intel i3)	15	Rp 2.050.000	Rp 30.750.000	BA.73/KWS1-KPB/PL.03.08/XI/2024, tanggal 01-11-2024
6	Wireless Access Point (Ubiquiti Unifi U6 Lite)	2	Rp 2.600.000	Rp 5.200.000	BA.3174/SU-PLI/DI.05.02/XII/2024, tanggal 11-12-2024
JUMLAH				Rp 680.074.000	

3. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp26.973.000

Reklasifikasi per 31 Desember 2024 kursi dan meja yang semula belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan menjadi peralatan dan mesin.

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga	Ket. BAST
1	2	3	4	5	6
1	Meja Kerja Besi/Metal	1	Rp 4.218.000	Rp 4.218.000	SPK.2125/BP3MI10/P L. 02.02/VII/2024
2	Meja Kerja Kayu	1	Rp 2.442.000	Rp 2.442.000	SPK.2125/BP3MI10/P L. 02.02/VII/2025
3	Kursi Besi/Metal	2	Rp 1.665.000	Rp 3.330.000	SPK.2125/BP3MI10/P L. 02.02/VII/2026
4	Meja Makan Kayu	1	Rp 10.878.000	Rp 10.878.000	SPK.2125/BP3MI10/P L. 02.02/VII/2027
5	Meja Makan Kayu	1	Rp 2.775.000	Rp 2.775.000	BA.416/SU.KU/PL.03.0 8/III/2024, tanggal 08-03-2024
6	Kursi Besi/Metal	3	Rp 1.110.000	Rp 3.330.000	BA.416/SU.KU/PL.03.0 8/III/2024, tanggal 08-03-2025
JUMLAH				Rp 26.973.000	

Gedung dan Bangunan
Rp3.550.296.828

C.4. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp3.550.296.828 dan Rp3.387.336.167. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	3.387.336.167
Mutasi tambah :	
Pembelian	198.532.741
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang :	
Koreksi Pencatatan	35.572.000
Saldo per 31 Desember 2024	3.550.296.908
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(579.778.268)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	2.970.518.640

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Rp5.301.674.704

C.5. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp5.301.674.704 dan Rp6.015.097.772. Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	8.573.442.000	0	8.573.442.000
2	Peralatan dan Mesin	5.854.082.098	4.721.896.436	1.132.185.662
3	Gedung dan Bangunan	3.550.296.828	579.778.268	2.970.518.560
Akumulasi Penyusutan		17.977.820.926	5.301.674.704	12.676.146.222

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp73.084.772

C.7. Piutang Tagihan TP/TGR

Saldo Tagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp73.084.772 dan Rp73.084.772. Rangkuman Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi hasil pemeriksaan BPK RI TA 2018 berupa Konsumsi PAP TKI, per tanggal 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)
Piutang Tagihan TP/TGR	73.084.772	73.084.772	-
Jumlah	73.084.772	73.084.772	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp73.084.772

C.8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp73.084.772 dan Rp73.084.772.

Rangkuman Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	kenaikan (penurunan)
Jangka Panjang	73.084.772	73.084.772	0,00
Jumlah	73.084.772	73.084.772	0,00

Aset Lainnya Rp26.626.746

C.10. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp26.626.746 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Direktorat Jenderal Akuntansi terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Dana Yang Dibatasi

Penggunaannya Rp26.626.746

C.10.1. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp26.626.746 dan Rp0. Pembayaran RPATA penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2024 tersaji pada tabel berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	kenaikan (penurunan)
Jasa Tenaga Driver atau Pengemudi	6.626.746		100,00
Jasa Tenaga Ahli Daya Petugas Bandara	20.000.000	-	100,00
Jumlah	26.626.746	-	100,00

Aset Lain-lain Rp1.106.836.550

C.10.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.106.836.550 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BP3MI Jawa Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutase Aset Lain-lain adalah sebagai berikut :

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi Tambah :	
Penghentian Penggunaan BMN	1.106.836.550
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang :	
Penggunaan Kembali BMN yang Diberhentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2024	1.106.836.550
Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(1.106.836.550)
Nilai Buku Per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan dan
Amortisasi Aser Lainnya
Rp1.106.836.550

C.10.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.106.836.550 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.106.836.550	1.106.836.550	-
Total	1.106.836.550	1.106.836.550	-

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp42.199.866

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp42.199.866 dan Rp195.287.762. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jasa Tenaga Ahli Daya Petugas Desember 2024	20.000.000	RPATA Pembayaran 2025
2	Jasa Tenaga Driver/Pengemudi Desember 2024	6.626.746	RPATA Pembayaran 2025
3	Listrik Desember 2024	10.465.900	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2025
4	Telepon Desember 2024	1.910.976	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2025
5	Air PDAM Desember 2024	51.000	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2025
6	Internet Desember 2024 (P4 Bekasi, P4 Sukabumi, P4 Cirebon dan LTSA Cirebon)	2.669.232	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2025
7	Telepon Pascabayar Kartu HALO Desember 2024 (Bandung, P4 Bekasi, P4 Cirebon, P4 Sukabumi)	476.012	Kwitansi Tagihan terbit di Bulan Januari 2025
	Jumlah	42.199.866	

Ekuitas Rp12.706.971.266

C.12. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.706.971.266 dan Rp11.603.575.325. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp9.717.000

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.717.000 dan Rp9.504.000. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir
31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

URAIAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.717.000	9.504.000	2,24
Jumlah	9.717.000	9.504.000	100,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari BPJS Ketenagakerjaan PMI selama Tahun 2024.

Beban Pegawai
Rp3.112.741.353

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.112.741.353 dan Rp4.707.959.885. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	993.308.100	1.776.066.500	(44,07)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.772	30.325	(47,99)
Beban Tunjangan-Tunjangan Gaji PNS	319.475.712	540.915.070	(40,94)
Beban Uang Makan PNS	75.235.000	291.028.000	(74,15)
Beban Lembur PNS	10.254.000	52.611.000	(80,51)
Beban Pegawai (Tunjangan Kinerja) PNS	1.040.383.451	1.894.177.936	(45,07)
Beban Gaji Pokok PPPK	306.367.200	56.775.600	439,61
Beban Pembulatan Gaji PPPK	6.336	532	1.090,98
Beban Tunjangan-Tunjangan Gaji PPPK	106.555.040	22.251.684	378,86
Beban Uang Makan PPPK	22.530.000	12.746.000	76,76
Beban Pegawai (Tunj. Kinerja) PNS PPPK	238.610.742	61.357.238	288,89
Jumlah	3.112.741.353	4.707.959.885	(33,88)

Beban Persediaan
Rp87.850.941

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp87.850.941 dan Rp94.008.606. Beban Persediaan merupakan Beban untuk mencatat penggunaan atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	87.850.941	94.008.606	(6,55)
Jumlah	87.850.941	94.008.606	(6,55)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.612.230.303 dan Rp6.160.251.329. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa Konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya realisasi peralatan dan mesin-ekstrakomtabel, honor output kegiatan, belanja jasa sewa. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.050.646.439	2.571.308.984	(20,25)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.731.615	7.313.450	5,72
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	72.780.000	136.368.000	(46,63)
Beban Barang Operasional Lainnya	107.208.526	73.618.944	45,63
Beban Bahan	1.116.296.277	689.297.713	61,95
Beban Honor Output Kegiatan	859.045.000	332.720.000	158,19
Beban Barang Non Operasional Lainnya	234.251.092	324.458.345	(27,80)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel	55.600.000	1.336.440	4.060,31
Beban Langganan Listrik	175.134.688	165.661.844	5,72
Beban Langganan Telepon	12.649.715	7.485.864	68,98
Beban Langganan Air	527.600	604.700	(12,75)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	66.193.818	66.359.666	(0,25)
Beban Jasa Sewa	1.293.465.533	1.342.417.398	(3,65)
Bebas Jasa Profesi	560.700.000	341.300.000	64,28
Bebas Jasa Lainnya	0	99.999.981	(100,00)
Jumlah	6.612.230.303	6.160.251.329	7,34

Beban
Pemeliharaan
Rp408.497.973

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp408.397.973 dan Rp348.867.841. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan Beban Pemeliharaan disebabkan karena penurunan alokasi anggaran pemeliharaan dan sebagian jumlah Aset yang dipelihara lebih sedikit karena dampak dari penghentian Aset dari penggunaannya pada Aplikasi Simak BMN. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	215.897.111	203.933.941	5,87
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.500.862	144.933.900	32,82
Jumlah	408.397.973	348.867.841	17,06

Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.758.283.701

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.758.283.701 dan Rp2.466.355.936. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas karena adanya kegiatan Kawan Pekerja Migran Indonesia dan Anggaran Biaya Tambahan pada Kegiatan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Terkendala serta bertambahnya anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan kegiatan Kawan PMI, untuk periode yang 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.333.309.180	1.003.024.755	32,93
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	949.150.000	706.500.000	34,35
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74.000.000	122.350.000	(39,52)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	401.824.521	634.481.181	(36,67)
Jumlah	2.758.283.701	2.466.355.936	11,84

Beban Penyusutan
Dan Amortisasi
Rp345.737.909

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp345.737.909 dan Rp161.143.569. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	274.986.793	90.258.917	204,66
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.751.116	70.884.652	(0,19)
Jumlah Penyusutan	345.737.909	161.143.569	114,55
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	345.737.909	161.143.569	114,55

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp18.026.143

D.8 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp18.026.143 dan Rp23.187.175. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN PENDAPATAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	35.150	22.680.000	(99,85)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	17.990.993	507.175	3.447,29
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	18.026.143	23.187.175	(22,26)

Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dari setoran Uang Makan bulan Desember 2023 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dari setoran Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) CPMI Tahun 2023.

D.9 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp656.376. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN dari KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	31 DES 2024	31 DES 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Rusak/Usang	-	656.376	(100,00)
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	656.376	(100,00)

**)Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp11.603.575.325

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas untuk pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.603.575.325 dan Rp11.388.054.636.

Defisit LO
Rp13.297.499.037

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.297.499.037 dan Rp13.906.552.367. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp970.856

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp970,856 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	970.856
Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah	970.856

Transaksi Antar
Entitas
Rp14.399.924.122

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.399.924.122 dan Rp14.122.073.056. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.798.639.694
Diterima ke Entitas Lain	(27.743.143)
Transfer Masuk	629.027.571
Jumlah	14.399.924.122

E.4.1 Diterima Entitas Lainnya (DDEL/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan Kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 DKEL sebesar Rp13,798,639,694 sedangkan DDEL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 Rp27.743.143.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp629.027.571 terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	Sekretaris Utama BP2MI	598.277.571
2	Peralatan dan Mesin	Deputi ASAF	30.750.000
Jumlah			629.027.571

Nilai transfer masuk setelah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Entitas Asal	Jumlah	Nilai Perolehan
1	2		3	4
1	Mobil Ambulance	Sekretaris Utama BP2MI	1	540.000.000
2	Kursi Besi/Metal	Sekretaris Utama BP2MI	5	11.825.000
3	Telephone Digital	Sekretaris Utama BP2MI	1	2.899.000
4	Anjungan Informasi Mandiri (AIM)	Sekretaris Utama BP2MI	3	89.400.000
5	P.C Unit (Dell 3650 Intel i3)	Deputi ASAF	15	30.750.000
6	Wireless Access Point (Ubiquiti Unifi U6 Lite)	Sekretaris Utama BP2MI	2	5.200.000
JUMLAH				Rp 680.074.000
PENYUSUTAN				Rp (51.046.429)
NILAI				Rp 629.027.571

Ekuitas Akhir
Rp12.706.971.266

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.706.971.266 dan Rp11.603.575.325.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting yang tercatat setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada kejadian penting yang tercatat temuan dan tindak lanjutan temuan BPK.

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Tidak ada daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual

F.4 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3MI) Jawa Barat adalah Bank BRI Virtual Account 65284263551000 Nama Rekening BPG 022 BP3TKI Bandung.

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 02 Januari 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2024.

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Erwin Rachmat, S.I.K.	Mulia Nugraha, S.I.K., M.H
2.	Kuasa Pengguna Barang	Erwin Rachmat, S.I.K.	Mulia Nugraha, S.I.K., M.H



**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
INSPEKTORAT**

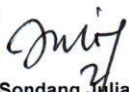


Jalan M.T. Haryono Kav.52 Jakarta Selatan 12770

Telp: (021) 79184254 Fax: (021) 7994685 Web: www.bp2mi.go.id

CATATAN HASIL REVIU

LAPORAN KEUANGAN BP3MI JAWA BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Uraian Hasil Reviu	Indeks KKR
Terdapat salah saji pada Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.749.171.132,00 seharusnya Rp26.626.746,00	CALK-03
Rekomendasi : memperbaiki salah saji pada Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 yang semula Rp12.749.171.132,00 menjadi Rp26.626.746,00	
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	
Terdapat salah saji pada Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp195.287.762,00 dan Rp427.306.477,00 seharusnya Rp42.199.866,00 dan Rp195.267.762,00	CALK-04
Rekomendasi : memperbaiki salah saji pada Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2024 dan 2023 yang semula masing-masing sebesar Rp195.287.762,00 dan Rp427.306.477,00 menjadi Rp42.199.866,00 dan Rp195.267.762,00	
Pengungkapan Lain-lain	
Terdapat beberapa kesalahan redaksional	
Rekomendasi: Lakukan koreksi sesuai dengan arahan tim reviu dalam CaLK	
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui	
<p>Jakarta, Januari 2025</p> <p>Pengendali Teknis</p>  <p>Sondang Juliana S NIP. 19820727 200912 2 001</p>	<p>Jakarta, Januari 2025</p> <p>Kepala BP3MI Jawa Barat</p>  <p>Mulia Nugraha, S.I.K.,M.H. Kombes Pol.NRP.69110405</p> 

**BADAN PELINDUNG PEKERJA MIGRAN INDONESIA
INSPEKTORAT**JL. MT Haryono kav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770
Telp: (021) 79184254 Fax: (021) 7994685 Web: www.bp2mi.go.id

Disusun oleh / Tanggal: Widhie Purbowati / Januari 2025

Direviu oleh / Tanggal: Widhie Purbowati / Januari 2025

Disetujui oleh / Tanggal: Sondang Juliana / Januari 2025

UAPA	BP2MI
UAPA-E1	SEKRETARIAT UTAMA
UAPA-W	BP3MI JAWA BARAT
UAKPA	BP3MI JAWA BARAT

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)		Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
			Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
A	Penerimaan Negara dan Hibah						
1	Penerimaan Pajak	-					-
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	27.743.143					27.743.143
	TOTAL PENERIMAAN	27.743.143					27.743.143
B	Belanja						
1	Belanja Pegawai	3.290.645.379					3.290.645.379
2	Belanja Barang	9.878.778.204					9.878.778.204
3	Belanja Modal	629.216.111					629.216.111
	TOTAL BELANJA	13.798.639.694					13.798.639.694

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Operasional (LO)

A	Pendapatan Operasional						
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.717.000					9.717.000
	Jumlah Pendapatan Operasional	9.717.000					9.717.000
B	Beban Operasional						
1	Beban Pegawai	3.112.741.353					3.112.741.353
2	Beban Persediaan	87.850.941	-		-		87.850.941
3	Beban Barang dan Jasa	6.612.230.303					6.612.230.303
4	Beban Pemeliharaan	408.397.973			-		408.397.973
5	Beban Perjalanan Dinas	2.758.283.701					2.758.283.701
6	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-					-
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	345.737.909	-		-		345.737.909
8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-		-		-
	Jumlah Beban Operasional	(13.315.525.180)	-	-	-	-	13.325.242.180
	Surplus/(defisit) dari kegiatan Operasional	13.315.525.180	-	-	-	-	(13.315.525.180)
C	Kegiatan Non Operasional						
1	Surplus/(defisit) pelepasan Aset Non Lancar	-	-		-		-
	Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	(18.026.143)			-		(18.026.143)
3	Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	-			-		-
	Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya	18.026.143	-	-	-	-	18.026.143
	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	18.026.143	-	-	-	-	18.026.143
D	Pos Luar Biasa						
	Beban Luar Biasa	-					-
	SURPLUS/ (DEFISIT) - LO	13.333.551.323	-	-	-	-	(13.297.499.037)

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

1	Ekuitas Awal	11.603.575.325					11.603.575.325
2	Surplus / Defisit Laporan	(13.297.499.037)	-		-		(13.297.499.037)
3	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	970.856,00	-		-		970.856
4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	970.856,00					
5	Transaksi Antar Entitas (Surplus + Dampak Kumulatif)	14.399.924.122					14.399.924.122
6	Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	1.103.395.941	-		-		1.103.395.941
7	Ekuitas Akhir	12.706.971.266	-	-	-	-	12.706.971.266

Ikhtisar Hasil Reviu Neraca							
No.	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)		Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
			Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum Dikoreksi (Rp)	
A	Aset						
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-					-
2	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	-					-
3	Persediaan	46.398.164					46.398.164
	JUMLAH ASET LANCAR	46.398.164					46.398.164
4	Aset Tetap						
	* Tanah	8.573.442.000					8.573.442.000
	* Peralatan dan Mesin	5.854.082.098					5.854.082.098
	* Gedung dan Bangunan	3.550.296.828					3.550.296.828
	* Jalan, Irigasi dan Jaringan	-					-
	* Aset Tetap Lainnya	-					-
	* Konstruksi Dalam Pengerjaan	-					-
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.301.674.704)					(5.301.674.704)
	JUMLAH ASET TETAP	12.676.146.222					12.676.146.222
5	Dana Yang Dibatasi	26.626.746					26.626.746
6	Aset Lain-lain	1.106.836.550					1.106.836.550
7	* Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(1.106.836.550)	-				(1.106.836.550)
	* Jumlah Aset Lainnya	26.626.746	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET	12.749.171.132	-	-	-	-	12.722.544.386
	Kewajiban						
	Kewajiban Jangka Pendek						
8	Utang Kepada Pihak Ketiga	42.199.866					42.199.866
9	Utang yang Belum Ditagihkan	-					-
9	Utang Muka dari KPPN	-					-
	JUMLAH KEWAJIBAN	42.199.866	-	-	-	-	42.199.866
B	Kewajiban dan Ekuitas Dana						
	Ekuitas						
	Ekuitas	12.706.971.266	-	-	-	-	12.680.344.520
	JUMLAH EKUITAS	12.706.971.266	-	-	-	-	12.680.344.520
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	12.749.171.132	-	-	-	-	12.722.544.386



Disetujui Oleh,
Kepala BP3MI Jawa Barat

Mulia Nugraha, S.P.K., M.H.
Kombes Pol. NRP.69110405

Tim Inspektorat BP2MI,
Pengendali Teknis

Sondang Jufana S
NIP. 19820727 200912 2 001

Ketua Tim

Widhie Purbowati
NIP. 19821117 201012 2 001

Anggota Tim,

Petrus Erixon Sihotang
NIP. 19770220 200912 1 001

Arif Gunawan
NIP. 19940923 201801 1 001

Jhonson Juli Siagian
NIP. 19890728 202012 1 005

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 30,59 persen dari realisasi belanja pada untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya perpindahan jabatan pelaksa menjadi Jabatan Fungsional sebanyak 5 pegawai;
2. Mutasi Pegawai Pindah sebanyak 4 orang;
3. Adanya pemindahan seluruh pembayaran belanja pegawai ke eselon I

Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2024	REALISASI 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.322.761.022	2.371.155.371	(44,21)
Belanja Uang Makan PNS	89.491.000	298.721.000	(70,04)
Uang Lembur PNS	10.254.000	52.611.000	(80,51)
Tunjangan Kinerja PNS	1.190.519.753	1.879.449.666	(36,66)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	412.928.576	79.027.816	422,51
Belanja Uang Makan PPPK	24.013.000	11.263.000	113,20
Tunjangan Kinerja PPPK	250.639.466	49.328.514	408,10
Jumlah Belanja Kotor	3.300.606.817	4.741.556.367	(30,39)
Pengembalian Belanja Pegawai	(9.961.438)	(925.000)	977
Jumlah Belanja	3.290.645.379	4.740.631.367	(30,59)

*Belanja Barang
Rp9.878.778.204*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.878.778.204 dan Rp9.269.979.790. Realisasi Belanja Barang Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 28,48 persen dari Realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang berupa : Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna dan keluarga sebanyak 2 Paket; adanya Kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan PMI dari anggota DPR RI dan adanya penambahan anggaran ABT Pekerja Migran Terkendala.